

RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2026. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat target capaian RENJA tahun 2026, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2025 dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, *review* terhadap perencanaan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo

[Handwritten Signature]
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah (Format A).....	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Format B)	16
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.3.a Tingkat kineja pelayanan perangkat daerah	18
2.3.b Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.....	21
2.3.c Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah	22
2.3.d Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.....	22
2.3.e Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.4.a Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	24
2.4.b Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan	24
2.4.c Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (Format C)	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
2.5.a Penjelasan tentang bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh	41
2.5.b Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Format D).....	47
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	54
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	54

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.3 Program dan Kegiatan (Format E).....	55
3.3.a Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb).....	59
3.3.b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.....	59
3.3.c Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun komninsi keduanya.....	59
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	70
BAB V Penutup	114



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6, Telepon (0352) 483 852,
Faksimile (0352) 483 852, Kode Pos (63413),

Website: [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Email: bakesbangpol_po@yahoo.com

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 00.7.2.6/ARH/3/405.27/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2026 adalah Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2026

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN YANG LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (**Format A**)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (**Format B**)
- 2.3 Isu – isu penting pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (**Format C**)
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD (**Format D**)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan (**Format E**)

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2026.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal, Agustus 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Besse Tenrisampeang
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2026 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2026. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2023 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2026 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2026 masih berpedoman kepada Permendagri Nomor : 18 Tahun 2021 dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2026 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2026;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 - 2029;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah menyediakan arah acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renja
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada penapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra dan telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya serta proyeksi tahun yang akan datang secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam Format A.

Format A

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	300%	300%
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	300%	300%
8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	100 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	150 Orang	150%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan paskibraka	Jumlah paskibraka	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	100%	70 orang	210 orang	300%
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Ponorogo	85	-	-	-	-	84,92	84,92	99%
						Persentase Pendidikan Politik pada kader partai politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Pendidikan politik oleh partai politik penerima bantuan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	20%
8 01 03 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	50 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
	Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 laporan	21 laporan	21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	63 laporan	15,7%
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Oragnisasi Kemasyarakatan	24%	23%	23%	23%	100%	24%	69%	287,5%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		yang aktif												
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	-	-	-	-	10	10	66,6%
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	15 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	200%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	300%
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,7	-	-	-	-	76	76	99%-
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan												
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	200%
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	15 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	200%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
8	01	05	2.02	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka Kriminalitas	21,6	27,16	26,59	21,58	118,8%	26,08	74,82	346,3%
					Persentase Potensi Konflik yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan kondusivitas keamanan, ketertiban di wilayah dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	15 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	200%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah												
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	15 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 Orang	30 Orang	200%
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	12 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	33 Dokumen	275%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024, adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam **Format B**.

Format B

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo**

No.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Angka Kriminalitas	-	-	27,15	26,59	26,08	25,56	25,80	21,58	26,08	25,56	
2.	Prosentase konflik sosial yang diselesaikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat Partisipasi Politik											
	a. PILPRES	-	-	-	70%	-	-	-	82,93%	-	-	
	b. PILEG DPD	-	-	-	70%	-	-	-	82,47%	-	-	
	c. PILEG DPR RI	-	-	-	70%	-	-	-	82,33%	-	-	
	d. PILEG DPRD Provinsi	-	-	-	70%	-	-	-	82,33%	-	-	
	e. PILEG DPRD Kabupaten	-	-	-	70%	-	-	-	82,26%	-	-	
	c. PILGUB	-	-	-	70%	-	-	-	75,51%	-	-	
	d. PILBUP	-	-	-	70%	-	-	-	75,41%	-	-	

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi;
2. Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
3. Konflik antar etnis;

2.3.a Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, dan bahasa, Ponorogo menjadi wadah bagi beragam kelompok kepentingan untuk menciptakan kultur toleran dengan berbagai ruang dan dimensi. Hal tersebut tentu saja membuat situasi toleransi di Kabupaten Ponorogo menuai beragam tantangan. Benturan budaya dan paham antar kelompok masyarakat serta perbedaan yang sering menimbulkan ketegangan sosial. Pada tingkat ekstrem, terkadang benturan tersebut yang berakibat terjadinya perpecahan dan konflik sosial.

Sebagai upaya mengurangi dampak negatif paham intoleransi, membangun kecerdasan emosi dan spiritual termasuk local wisdom yang menjadi bagian dari budaya yang harus terus dilaksanakan. Pembangunan fisik Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang penting, namun alangkah baiknya untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap menjaga budaya dan karakter kebangsaan. Kedepan, pendidikan dengan basis multikultural perlu dikembangkan terutama di tingkat pendidikan formal yaitu sekolah. Hal tersebut diharapkan dapat dimanifestasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ada.

Tantangan di era globalisasi dan kemudahan akses informasi mempengaruhi kondisi ideologi kebangsaan dan rasa cinta tanah air khususnya di kalangan generasi muda. Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menjadi instansi yang mengampu kegiatan paskibraka mulai dari seleksi sampai pelatihan. Paskibraka merupakan salah satu kegiatan pembentukan karakter patriotisme, disiplin, dan pengabdian kepada negara. Generasi muda yang aktif dalam paskibraka bukan hanya memahami prosedur pengibaran bendera yang benar melainkan menghayati secara mendalam nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang terkandung dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia serta menjadikan generasi muda sebagai pionir kesadaran berbangsa dengan semangat nasionalisme di tengah lunturnya pemahaman ideologi Pancasila pada sebagian besar generasi muda yang lebih tertarik dengan budaya global.

Konsekuensi lain dari banyaknya pengaruh luar akibat kemajuan teknologi mengakibatkan terjadinya kompleksitas permasalahan dimana semakin rawannya bahaya peredaran narkoba yang multidimensi dan kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan bagian dari *proxy war* yang dapat menghancurkan ideologi bangsa dan ketahanan nasional. Selama tahun 2024, menurut data Satresnarkoba Polres Kabupaten Ponorogo terdapat 68 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 58. Berdasarkan jumlah kasus dan tersangka, angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 9% dibandingkan dengan tahun 2023 namun mengalami kenaikan pada jumlah barang bukti. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba kepada generasi muda (pelajar SMA/SMK) di Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 merupakan salah satu tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna menciptakan pemilihan umum yang kondusif dan partisipatif. Beberapa isu yang menjadi hambatan dan tantangan dalam eskalasi politik di wilayah Kabupaten Ponorogo yakni adanya penyebaran praktik politik identitas (paham yang mengutamakan kepentingan kelompok

dengan didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain); penyebaran berita bohong (hoax); serta ujaran kebencian yang diungkapkan dalam bentuk foto, gambar, ilustrasi, meme dan kata-kata yang memiliki konotasi provokasi, penghinaan dan hasutan kepada individu maupun pejabat publik.

Tantangan semakin besar karena semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Terlebih angka kecenderungan pengguna internet dalam penyebaran berita hoax terus mengalami peningkatan. Hoax merupakan aspek yang sudah menjadi bagian dari politik dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara massif memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum kepada beberapa lapisan masyarakat seperti generasi muda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Ponorogo mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Pada aspek persatuan dan kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak terkait guna tetap menjaga masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur yang berwawasan serta memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi.

Upaya cipta kondusif daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi salah satu prioritas utama. Melakukan monitoring dan pengawasan apabila terjadi kegiatan demonstrasi dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik. Penguatan dan sinergi dengan beberapa instansi terkait juga merupakan upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas.

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dalam bentuk pelayanan publik yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah pemberian rekomendasi izin penelitian / survei dari lembaga, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang memerlukan izin penelitian.

Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.3.b Permasalahan dan Hambatan dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- ❖ Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga keamanan dan ketenteraman di masyarakat akan tercapai.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Adanya konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
2. Konflik yang terjadi karena adanya gesekan antar perguruan silat dan bela diri yang ada di Kabupaten Ponorogo;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat;

- ❖ Sasaran Strategis kedua yaitu : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga partisipasi masyarakat dalam politik akan meningkat.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dalam hal pendirian ORMAS dan LSM.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ke depan dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Faktor geografis yang luas sehingga jangkauan dalam pengawasan kepada warga masyarakat terbatas;

2. Kesadaran warga masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.

2.3.c Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah program yang mendukung Misi 3 yaitu “Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”.

2.3.d Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Aspek Struktural dan Kelembagaan

Koordinasi antar instansi seringkali menjadi kendala utama, terutama dalam penanganan isu-isu yang bersifat lintas sektoral seperti radikalisme atau konflik sosial. Keterbatasan kewenangan dalam beberapa aspek juga mempengaruhi efektivitas penanganan masalah kebangsaan dan politik di tingkat kabupaten.

2. Sumber Daya Manusia

Kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam memahami dinamika politik kontemporer dan isu-isu kebangsaan yang berkembang. Kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan modern seperti hoaks, polarisasi politik digital, dan gerakan radikalisme online menjadi prioritas.

3. Teknologi dan Digitalisasi

Sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal antara pusat dan daerah, serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi untuk monitoring dan early warning system terkait potensi konflik atau gangguan keamanan.

4. Dinamika Sosial-Politik Lokal

Kabupaten Ponorogo memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dengan berbagai organisasi keagamaan dan politik. Mengelola keberagaman ini sambil menjaga stabilitas dan persatuan memerlukan pendekatan yang sensitif dan komprehensif.

Sedangkan, peluang yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Potensi Budaya dan Sejarah

Ponorogo memiliki kekayaan budaya seperti Reog Ponorogo yang dapat menjadi media pemersatu dan penguatan identitas kebangsaan. Nilai-nilai luhur dalam budaya lokal dapat diintegrasikan dalam program-program kebangsaan.

2. Partisipasi Masyarakat

Tradisi gotong royong dan partisipasi masyarakat yang masih kuat dapat dimanfaatkan untuk program-program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada dapat menjadi mitra strategis.

3. Teknologi Digital

Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk edukasi kebangsaan, counter-narrative terhadap radikalisme, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Sistem pelaporan dan monitoring berbasis aplikasi dapat meningkatkan responsivitas pelayanan.

4. Kerjasama Multi-Stakeholder

Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan, LSM untuk program pemberdayaan, dan sektor swasta untuk dukungan program corporate social responsibility.

2.3.e Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun yang Direncanakan

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 antara lain:

1. Perlunya menjaga kerukunan umat beragama, keserasian dalam perbedaan baik suku, agama, bahasa, ras dan budaya;
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang mengancam kualitas generasi bangsa;
3. Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Peningkatan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat

5. Peningkatan rasa aman, stabilitas keamanan untuk menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan

2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program / kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

2.4.a Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Keselarasan Program dan Kegiatan nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam dokumen rencana kerja memuat informasi rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

2.4.b Penjelasan Mengenai Alasan Proses Tersebut Dilakukan

Proses penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 di dasarkan pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan Program serta Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

2.4.c Penjelasan Temuan-Temuan Setelah Proses Tersebut dan Catatan Penting terhadap Perbedaan Dengan Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan di konsolidasikan dengan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Penjelasan lebih lanjut akan terlampir dalam **Format C**.

Format C

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.215.604.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.308.356.770	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	90%	3.778.866.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	90%	3.972.043.770	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	11.974.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	11.974.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.235.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.235.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.739.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	3.208.542.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	3.401.718.470	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua	Jumlah Orang yang Menerima	30 Orang/bulan	3.117.416.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orang/bulan	3.310.592.470	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Gaji dan Tunjangan ASN				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tunjangan ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.387.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.387.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.739.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja	90%	24.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja	90%	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	24.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	336.436.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	365.436.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.196.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	158.532.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	194.728.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.298.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.298.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.410.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.410.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi	90%	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi	90%	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah				Semua Kel/Desa	Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah			
	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	47.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	42.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	130.913.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	130.913.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	113.505.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3 Unit	113.505.300	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Kel/Desa	dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	6.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	11.408.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	11.408.400	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terasampaikannya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	659.450.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terasampaikannya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	659.450.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	659.450.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	659.450.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	298.950.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	298.950.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	360.500.000	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	360.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan yang Melaksanakan Pendidikan Politik	100%	1.902.264.400	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan yang Melaksanakan Pendidikan Politik	100%	3.051.840.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Kab. Ponorogo, Semua	Persentase Pencairan	100%	1.902.264.400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Kab. Ponorogo,	Persentase Pencairan Bantuan	100%	3.051.840.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Keuangan Kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	1.732.864.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	2.882.440.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di	Kab. Ponorogo,	Jumlah Orang	32 Orang	167.900.400	Pelaksanaan Koordinasi di	Kab.	Jumlah Orang yang	32 Orang	167.900.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	3 Laporan	1.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	3 Laporan	1.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	23 %	121.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	23 %	121.500.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencairan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	100%	121.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencairan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	100%	121.500.000	
	Pelaksanaan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran	10 Orang	100.000.000	Pelaksanaan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	10 Orang	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	20.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	3 Laporan	1.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	3 Laporan	1.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tersampainya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100% 76 Angka	110.473.300	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tersampainya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100% 76 Angka	160.473.300	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kethanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100%	110.473.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kethanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100%	160.473.300	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	5 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Kab. Ponorogo, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	5 Orang	80.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kel/Desa	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70 Orang	78.973.300	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70 Orang	78.973.300	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	1.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	1.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	1.643.050.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	1.343.050.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	100%	1.643.050.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	100%	1.343.050.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Orang	10.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Orang	910.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	70 Orang	310.550.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	70 Orang	310.550.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Konflik di Daerah		Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Penanganan Konflik di Daerah		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	1.321.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	121.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka untuk perencanaan program dan kegiatan tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, utamanya terkait dengan terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

2.5.a Penjelasan Tentang Bagaimana Usulan Program / Kegiatan Usulan Pemangku Kepentingan tersebut Diperoleh

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan ini menjadi kunci utama untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan tantangan keamanan serta stabilitas politik yang dihadapi daerah.

Beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo antara lain:

1. Instansi vertikal (Polres, Kodim, Kejaksaan, TNI, dsb);
2. Organisasi Kemasyarakatan;
3. Partai Politik;
4. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKU);
6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
7. Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri (FKPSB);
8. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset.

Proses pengumpulan usulan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan secara rutin di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

2.5.b Penjelasan Kesesuaian Usulan Tersebut Dikaitkan dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Usulan hasil Forum Perangkat Daerah (FPD) dikompilasi dan dianalisis berdasarkan tingkat prioritas, kesesuaian dengan visi misi kepala daerah, ketersediaan anggaran dan sumber daya. Hasil analisis tersebut akan dituangkan kedalam beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, terlampir lebih lanjut pada **Format D**.

Format D

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	90%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kel/Desa			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	90%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terasampaikannya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan yang Melaksanakan Pendidikan Politik	100%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	32 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kel/Desa	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	23 %	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencairan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	100%	
	Pelaksanaan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tersampainya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100% 76 Angka	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kethanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	5 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kel/Desa	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Usaha-usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai, diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Selain itu keamanan dan ketentraman yang merupakan salah satu pendukung tercapainya pola pembangunan di suatu wilayah / daerah adalah menjadi prioritas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo guna mendukung tercapainya keseluruhan program-program Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 5 tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai unit pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan dan perlu ditetapkan strategi kebijakan program dan kegiatan. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan Suprastruktur politik dan infrastruktur politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan, sasaran dan beberapa program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dimana pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

a) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari

pada misi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

“Mewujudkan lingkungan daerah yang kondusif“

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

b) Sasaran.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Indikator sasaran :

1. Persentase kejadian POLEKSOSBUD yang dapat ditangani;
2. Predikat evaluasi implementasi SAKIP

Sedangkan, Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Angka Kriminalitas;
2. Prosentase Konflik Sosial yang Diselesaikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2026 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat“

Sasaran tersebut dicapai dengan 5 Program , 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.

1.2. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

- 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 1.3. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
 - 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
 - 1.3. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
 - 1.4. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.

- 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.

V. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.
 - 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sasaran 2 :

“Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah “

Sasaran tersebut dicapai dengan 1 Program , 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
 - 4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3.3.a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (visi dan misi Kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb)

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo melakukan analisis beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1. Keragaman etis dan potensi konflik;
2. Dinamika kondisi organisasi kemasyarakatan;
3. Melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dikalangan generasi muda;
4. Gangguan kamtibmas seperti premanisme;
5. Disparitas ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat;
6. Maraknya kasus narkoba di masyarakat.

3.3.b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya)

Secara garis besar terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo. Jumlah kebutuhan anggaran / pagu indikatif RKPD tahun 2026 sebesar Rp9.308.356.770.

3.3.c Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD baik berdasarkan jenis program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif. Penjelasan lebih lanjut pada lampiran **Format E**.

Format E

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo**

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026, maka disusun rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir dalam tabel T- C33 sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.215.604.300				8.215.604.300				
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					8.215.604.300				8.215.604.300				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	3.778.866.600	APBD		90%	3.778.866.600
8	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	11.974.000	APBD		90%	11.974.000
8	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.235.000	APBD	3 Dokumen	6.235.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.739.000	APBD		1 Laporan	5.739.000
8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	3.208.542.000	APBD		90%	3.208.542.000
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bulan	3.117.416.000	APBD		30 Orang/bulan	3.117.416.000
8	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	85.387.000	APBD		12 Dokumen	85.387.000
8	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.739.000	APBD		1 Laporan	5.739.000
8	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	24.000.000	APBD		90%	24.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	24.000.000	APBD		30 Paket	24.000.000
8	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	336.436.900	APBD		90%	336.436.900
8	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	7.196.100	APBD		3 Paket	7.196.100
8	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	40.000.000	APBD		2 Paket	40.000.000
8	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	153.532.300	APBD		4 Paket	153.532.300
8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	13.298.500	APBD		4 Paket	13.298.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	17.410.000	APBD		12 Dokumen	17.410.000
8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	100.000.000
8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	20.000.000	APBD		90%	20.000.000
8	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	20.000.000	APBD		10 Unit	20.000.000
8	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	47.000.000	APBD		90%	47.000.000
8	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.000.000	APBD		2 Laporan	5.000.000
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000	APBD		12 Laporan	12.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000	APBD		12 Laporan	30.000.000
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	130.913.700	APBD		90%	130.913.700
8	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	113.505.300	APBD		3 Unit	113.505.300
8	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	6.000.000	APBD		15 Unit	6.000.000
8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	11.408.400	APBD		15 Unit	11.408.400
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Terasapaikannya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	659.450.000	APBD		100%	659.450.000
8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengutan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	689.450.000	APBD		100%	659.450.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	298.950.000	APBD		50 Orang	298.950.000
8	01	02	2	01	08	Pembentukan paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	390.500.000	APBD		70 Orang	360.500.000
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan yang Melaksanakan Pendidikan Politik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1.902.264.400	APBD		100%	1.902.264.400
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1.902.264.400	APBD		100%	1.902.264.400
8	01	03	2	01	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	1.732.864.000	APBD		35 Orang	1.732.864.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Orang	167.900.400	APBD		32 Orang	167.900.400
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.500.000	APBD		3 Laporan	1.500.000
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 %	121.500.000	APBD		23 %	121.500.000
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pencairan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	121.500.000	APBD		100%	121.500.000
8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000	APBD		10 Orang	100.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	04	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	20.000.000	APBD		30 Orang	20.000.000
8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.500.000	APBD		3 Laporan	1.500.000
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tersampainya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 76 Angka	130.473.300	APBD		100% 76 Angka	110.473.300
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kethanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	130.473.300	APBD		100%	110.473.300
8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000	APBD		5 Orang	30.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	78.973.300	APBD		50 Orang	78.973.300
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.500.000	APBD		3 Laporan	1.500.000
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang dapat diredam	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1.643.050.000	APBD		100%	1.643.050.000
8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1.643.050.000	APBD		100%	1.643.050.000
8	01	06	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	10.000.000	APBD		5 Orang	10.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	310.550.000	APBD		70 Orang	310.550.000
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.500.000	APBD		3 Laporan	1.500.000
8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	1.321.000.000	APBD		11 Dokumen	1.321.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat program kerja dan alokasi anggaran untuk setiap unit organisasi pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RKPD disusun berdasarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan mengintegrasikan aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PENCAPAIAN CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUK BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAH
							TARGET 2025	PAJAK INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJAK INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Modal yang Pembelian melalui Pencapaian				80 %	3.001.719.470,00				Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pembelian barang modal melalui pencapaian	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pembelian barang modal melalui pencapaian	Karyawan Pegawai Berkas Kapasitas Manajemen	3.000.000.000,00	BANJIR GEMPA GAS
	01.01.01.2.02.0001	Penyediaan Barang Modal														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PESILISAH CAPAIAN RESTRASI OPD TAMBAH 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUK BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAH
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pembangunan Ruang ASW				11 Dokumen	Rp 307.000,00	Pada Pembangunan Gedung Kantor Kantor Kantor	DANA ALYKAS UMKM (DAU)	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam penyusunan dokumen administrasi pembangunan ruang ASW melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif dan efisien dalam penyusunan dokumen administrasi pembangunan ruang ASW	Karyawan Karjasa Babat berbagai Kategori P.00000		30.000.000,00	BANJIR GEMPA SARUNG BAYU DAN PADA SARUNG	
01.01.01.3.02.0008																

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG / URSAS / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN BELLA OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET BELLA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJJI BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAJJI INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJJI INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dan Pengabdian yang Dilaksanakan				4 Pukul	75.000.000,00	Kab. Ponorogo, Distrik Kecamatan, Seluruh Kecamatan	DANA ALYAKSI (DAK) (DAK)	Melaksanakan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.	1. Tahap Persiapan: Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan lokasi, waktu, dan materi pelatihan. 2. Tahap Pelaksanaan: Melakukan pelatihan secara langsung kepada masyarakat. 3. Tahap Penyelesaian: Melakukan evaluasi dan dokumentasi kegiatan.	Karyawan Karjasa Babel sebagai Karyawan P. 2027		10.000.000,00	BAN HARJO SATYAN BAHASA DEWYATI, SIK
	R.01.01.2.08.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIOD RESTRAT OPD	PESULUS CAPAIAN RESTRAT OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRAT OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUK BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAB	
							TARGET 2025	PAJUK INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJUK INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01.01.2.07	Pengelolaan Risiko Disaster Penanggulangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RENCANA KORPORATIF Pemerintah Daerah				80%	30.000.000,00				Meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menyusun rencana kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan kegiatan pemerintah daerah lainnya dan mendukung terwujudnya kegiatan pemerintah daerah lainnya yang sesuai dengan kegiatan pemerintah daerah lainnya dan mendukung terwujudnya kegiatan pemerintah daerah lainnya	Karyawan Karyawan Bahan Baku Kapasitas Pengerja		15.000.000,00	BANJIR GEMPA SARUNG DAN SARUNG	
	01.01.2.07008	Pengelolaan Risiko															

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG / URSAS / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE REGISTRASI OPD	PESULUSAN CAPAIAN BELLA OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET BELLA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH BELLA BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pabrik Industri yang Dipekerjakan				10 Unit	30.000.000.000	Pada Pemukiman, Daerah Perkotaan, Daerah Perkotaan, Daerah Perkotaan	DANA AL. DAERAH (DAD)	Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pada faktor dan indikator serta mampu mengaitkan pemerintah dan masyarakat, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pada faktor dan indikator serta mampu mengaitkan pemerintah dan masyarakat, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Karyawan Karjasa Babel sebagai Karyawan P. sebagai		15.000.000.000	BANGUNAN SATUAN BANGUNAN DOKUMEN

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PESULUS CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUK BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAH
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan/Prosedur Jenis Sifat Masyarakat				21.40000	0.00	Pada Peningkatan Jumlah Konsultasi, Sesuai POKDAS	DANA AL. DAERAH UMUM (DAMU)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan komite desa/kelurahan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan komite desa/kelurahan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan komite desa/kelurahan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat desa/kelurahan	Karyawan Karjawati Batas anggaran Kapasitas P. anggaran		4.300.000.00	BAN KEMENTERIAN BANTUAN DESA/PUSA/UKM	
01.01.2.00000		Penyediaan Jasa Konsultansi	Bantuan Desa dan Lain-lain													

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE REGISTRASI OPD	PESULUSAN CAPAIAN BELLA OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET BELLA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH BELLA BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan/Proyeksi Jaku Kesehatan, Sumber Daya Air dan Lantai yang Disediakan				T1 Laporan	T1 200 000,00	Pada Peningkatan Status Keselamatan, Kesehatan Masyarakat, dan Lingkungan (PKM)	DANA AL. DAERAH (DMD)	Meningkatkan Efektivitas pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan sarana kesehatan, melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan	1. T1 200 000,00 2. T2 200 000,00 3. T3 200 000,00 4. T4 200 000,00 5. T5 200 000,00 6. T6 200 000,00 7. T7 200 000,00 8. T8 200 000,00 9. T9 200 000,00 10. T10 200 000,00 11. T11 200 000,00 12. T12 200 000,00 13. T13 200 000,00 14. T14 200 000,00 15. T15 200 000,00 16. T16 200 000,00 17. T17 200 000,00 18. T18 200 000,00 19. T19 200 000,00 20. T20 200 000,00	Karyawan Karjasa Babel sebagai Karyawan P. Beres		13.000.000,00	BAN KEMASATUN BAKHUK. DOK. P14.016
01 01 2 00 000		Penyediaan Jasa Pelayanan Utama Kesehatan														

NO	KODE	LEMBAGAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRADA OPD	PESULUS CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2024	INDIKATOR CAPAIAN TARGET RESTRADA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARSI BAKU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGULANGAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemukiman Diantara Diponegoro dan Lapangan yang Dijembatani dan Melayaknakan Pejalan dan Pecaturanya				10 Unit	0.000.000.000	Pada Pemukiman Diantara Kusamban, Sektus PONDORAS	DANA AL. DAERAH UMUM (DAMU)	Meningkatkan Fasilitas jalan pedestrian, taman rekreasi, dan lain-lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan pedestrian yang dijembatani dan melayaknakan pejalan dan pecaturanya	100% (10/10)	Karyawan Karjawan Bakul Bergepok Kusamban PONDORAS		0.000.000.000	BAN KEMAS BAKUL BAYUSK. DPO/ PDL/ SDC
	0.01.01.2.08.0008	Pembinaan Pemukiman dan Monev Lurah														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIOD PERSTRAS DAOP	PESILISASI CAPAIAN BELLA OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET BELLA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN BELLA BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01.02.02.01	Pelaksanaan Kegiatan Teknik dan Peningkatan Penguasaan Bidang Biologi, Farmasi dan Kesehatan Kelangkaan	Pelaksanaan Kegiatan Penguasaan Bidang Farmasi dan Kesehatan Kelangkaan	-	-	-	100 %	800.000.000,00				Meningkatkan kemampuan biologi dan farmasi nasional dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan pada tingkat nasional guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan pada tingkat nasional dan tingkat daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional dan daerah.	Masyarakat	-	800.000.000,00	BANJIRING, SATYAN BAYUSKA, DEWI, PUSLISIR
	01.02.02.010001	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Biologi, Kesehatan Kelangkaan, Farmasi, Kesehatan Kelangkaan, Farmasi, Kesehatan Kelangkaan, Farmasi, Kesehatan Kelangkaan														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PESILISAH CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUH BERKAMA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan di Bidang Kehutanan, Konservasi, dan Rehabilitasi Kawasan dengan Pendekatan Komunitas, Sesuai Target dan Standar Kompetensi				50 Orang	Rp 500.000,00	Pada Peningkatan dan Pemertanian, Sesuai POKDOR	DANA ALYKAS (DAK) (DAU)	Melakukan inisiatif pelatihan di bidang Kehutanan, Konservasi, dan Rehabilitasi Kawasan dengan Pendekatan Komunitas, Sesuai Target dan Standar Kompetensi	100% (100%)	50.000.000,00		50.000.000,00	BANJIRING SATUAN BAHASA DAN POLA BAHASA
	R.01.02.2.01.0008	Pembinaan Pendidikan														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE REGISTRASI OPD	PESULUSAH CAPAIAN SELAMA OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET SELAMA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN SAJJI BENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mahasiswa				10 orang	300.000.000,00	Pada Peningkatan, dengan Kesuksesan, dengan POKJONAS	DANA AL. DIPA3 (DAN)	Melaksanakan inisiatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.	Masyarakat		300.000.000,00		BANJIR, GEMPA BAYU, DAN PLAGIOL
1	B.M.01	PROGRAM PEMBERKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDUKUNG MELALUI PEMBERKATAN POL. DAN PEMBERKATAN STRUK. SERTA BUDAYA POLITIK	Penerbitan Penetapan Politik pada Kader Partai Politik	-			100 %	1.011.000.000,00						-	1.011.000.000,00	

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PESULUS CAPAIAN SELAMA OPD TAMBAH 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET KEMAJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJJI BENCANA TANPA 2027		PERANGKAT DASAR PENGANGGARAN JAWAB
							TERTAKT 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PISORITAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.01.01.2.01		Pelayanan Kegiatan Teknik dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etik dan Tata Kelola Pemerintahan, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Pendidikan dan Politik Publik, Pendidikan Umum/Pendidikan, Urutan Raport Daerah, serta Pemantauan Kinerja Politik	Terdapat seluruh Pendidikan Publik dan Politik Publik, Pemantauan Kinerja Kegiatan	-			100 %	2.001.000.000,00				1. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintahan.	Manajemen	-	1.811.000.000,00	BALAI KEMAS BANGUN BAYUSK, DOK/PLA/SHK
01.01.01.2.01.0001		Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etik dan Tata Kelola Pemerintahan, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Pendidikan dan Politik Publik, Pendidikan Umum/Pendidikan, Urutan Raport Daerah, serta Pemantauan Kinerja Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE RENSTRA OPD	PESILISASI CAPAIAN BELLA OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET BELLA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN BELLA BENCANA TAHUN 2027		PEMANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penanganan di Bidang Penanganan PPKB, Eka Budaya PPKB, Penggubatan Daridarah, Fasilitas/Kelembagaan Penanggulangan, Penanganan dan PPKB, PPKB, Perbaikan (Akses/Daridarah) Urea Kipoda Daridarah, serta Penanganan Sisaan PPKB di Daerah				33 Orang	187.000.400,00	Pada Penanganan, Daridarah, Penanganan, Sisaan PPKB	DANA AL. DAKU2 (MELAKI (DAU))	Melaksanakan kegiatan penanganan PPKB, Eka Budaya PPKB, Penggubatan Daridarah, Fasilitas/Kelembagaan Penanggulangan, Penanganan dan PPKB, PPKB, Perbaikan (Akses/Daridarah) Urea Kipoda Daridarah, serta Penanganan Sisaan PPKB di Daerah	Masyarakat		3.000.000,00	BAN HARJO SATUAN BANTUAN DOK/PK/SL/SH	
0.01.001.01.0008		Penanganan Masalah yang Terjadi dan Pelayanan di Bidang Penanganan PPKB, Eka Budaya PPKB, Penggubatan Daridarah, Fasilitas/Kelembagaan Penanggulangan, Penanganan dan PPKB, PPKB, Perbaikan (Akses/Daridarah) Urea Kipoda Daridarah, serta Penanganan Sisaan PPKB di Daerah														

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIODE RESTRASI OPD	PESULUS CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJUK BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2025	PAJUK INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJUK INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.01.04.2.01	Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kementerian	Prosedur-Prosedur Model Reproduksi Organisasi Komunitas Persepsi Masyarakat Adat Terkini dan Perencanaan Organisasi Komunitas	-	-	-	-	100 % 100 %	121.000.000,00				Meningkatkan efektivitas pelaksanaan politik, hukum dan kebijakan serta mampu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, menyusun, dan melaksanakan rencana, strategi, dan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian visi misi organisasi pada tingkat nasional, mendukung pencapaian visi misi organisasi pada tingkat internasional, melaksanakan pada tingkat nasional, melaksanakan pada tingkat internasional, serta dan melaksanakan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah pusat dan	Masyarakat	-	10.000.000,00	BAN HENDI SATYAN BAYUSKA DEWI PUTRI
01.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemantauan Kinerja, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mutu, Kegiatan Ormas, Pengembangan Ormas dan Ormas yang di Dukung															

NO	KODE	LEMBANG / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE RENSTRA OPD	PESILISAN CAPAIAN BELAJA OPD TAHUN 2024	PRAKARAH CAPAIAN TARGET KEMAJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH SAJJI BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAJAK INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJAK INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Ruang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Diselisi Sangkita Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Anak & Disabilitas				10 Orang	100.000.000,00	Pada Peningkatan Ormas, Penguatan, dan Ormas, sesuai PO/Ormas	DANA AL. ORMAS (DAU)	Meningkatkan Partisipasi Ormas dalam pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan peran aktif ormas dalam pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat lainnya.	ARTIS BERTALANTA (ARTIS) dan KEMAJA (KEMAJA) dan Monev (Monev) yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas, Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan Kecamatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ini.	Masyarakat		50.000.000,00	BAN HUKUM SATELIT BAHASA DAN POLISIA
R.01.04.2.01.0001		Pembinaan Keaktifan di Ruang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Diselisi Sangkita Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Anak & Disabilitas														

NO	KODE	LEMBAGA / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANER PERIOD RESTRAL OPD	PESULUS CAPAIAN RESTRAL OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RESTRAL OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN SAJJI BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASAR PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAJJI INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAJJI INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01.01.00.2.01	Pelayanan Kesehatan Telinga dan Hidung	Pelayanan Kesehatan Telinga dan Hidung	Diaksesnya Kapsul dan Penderita Penyakit Telinga dan Hidung	-	-	-	100 %	1.343.000.000,00				Meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Telinga dan Hidung.	Meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Telinga dan Hidung.	Manajemen	-	275.000.000,00	BAN HENDI SATYAN BAYUSKA DEWI PUTRI
01.01.00.2.01.0001	Pelayanan Kesehatan di Bidang Kesehatan (Din, Kesehatan Mental, Kesehatan Fisik, Kesehatan Anak, Kesehatan Perempuan, Kesehatan Lansia, Kesehatan Masyarakat)	Pelayanan Kesehatan di Bidang Kesehatan (Din, Kesehatan Mental, Kesehatan Fisik, Kesehatan Anak, Kesehatan Perempuan, Kesehatan Lansia, Kesehatan Masyarakat)	Diaksesnya Kapsul dan Penderita Penyakit Telinga dan Hidung	-	-	-	100 %	1.343.000.000,00				Meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Telinga dan Hidung.	Meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Telinga dan Hidung.	Manajemen	-	275.000.000,00	BAN HENDI SATYAN BAYUSKA DEWI PUTRI

BAB V PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2026.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang politik dan keamanan di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya yang bersifat dinamis, sepanjang proses pembangan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdaya guna serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

5.a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah program dan kegiatan serta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran.

5.b Kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu:

1. Renja merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol
2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat didalamnya

5.c Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2026, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta implimentasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2026.

Ponorogo, Agustus 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Dra. Besse Terrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002